

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MELALUI PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)



AN 11/05

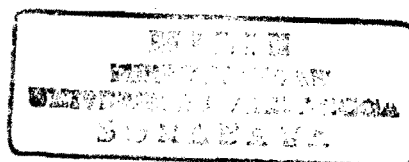
War

P

MENIK NOVI WARDHANI
030115166

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

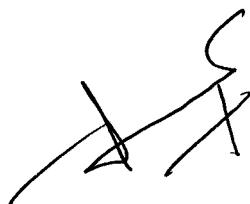


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA
MELALUI PROGRAM
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)**

SKRIPSI

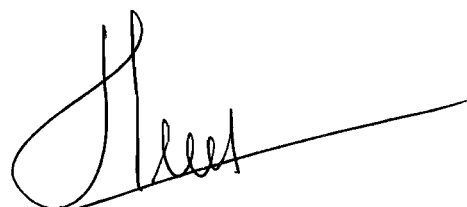
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Lanny Ramly, SH., M.Hum.
NIP. 131878338

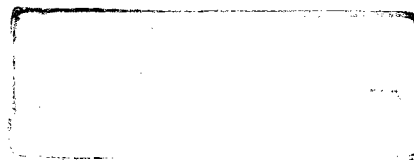
Penyusun,



Menik Novi Wardhani
Nim : 030115347

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

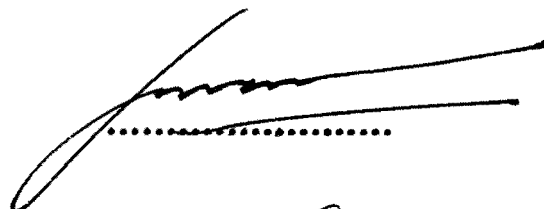
2004



**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Senin, Tanggal 25 Oktober 2004**

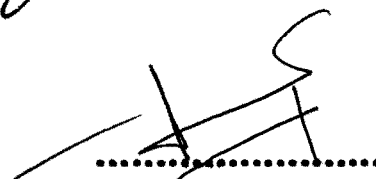
Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Machsoen Ali, SH. MS.



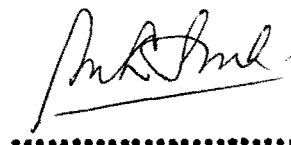
.....

Anggota : 1. Lanny Ramly, SH., M.Hum.



.....

2. Dr. ML. Souhoka, SH., M.S.



.....



BAB IV

P E N U T U P

➤ Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang diselenggarakan oleh pemerintah, dimana PT. Jamsostek (Persero) yang ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara (BP) ternyata masih kurang memadai, sehingga masih diperlukan perbaikan-perbaikan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai yang dikehendaki oleh peserta.
2. Pada kenyataanya, perlindungan hukum dan penegakan hak – hak pekerja belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Ada beberapa factor penghambat yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak adanya dukungan dari pihak yang kepentingannya harus dilindungi, dalam hal ini adalah tenaga kerja, karena selama ini belum pernah ada sikap keberatan dari tenaga kerja sendiri, misal dalam bentuk pengaduan kepada instansi yang berwenang. Mereka (tenaga kerja) cenderung menerima apa adanya.

- b. Masih rendahnya kesadaran hukum pengusaha
- c. Lemahnya unsur pengawasan dari pihak pemerintah (Dinas Tenaga Kerja setempat) yang seolah – olah “ merestui “ tindakan pengusaha yang tidak pada tempatnya itu.
- d. Minimnya sanksi yang diberikan Undang – undang yaitu dengan tidak dicantumkannya sanksi secara tegas terhadap pengusaha yang tidak memfasilitasi pekerjanya untuk ikut dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sehingga praktis semakin memperlemah unsur pengawasan terhadap mereka.

➤ **Saran**

1. Perlu adanya penyuluhan oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), agar tenaga kerja tahu akan hak – haknya dan pengusaha lebih menyadari dan mentaati kewajiban – kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan tentang ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan bagi pekerja, dengan jalan terjun langsung dan menindak secara tegas terhadap pelanggaran – pelanggaran yang mungkin terjadi

3. Memperberat sanksi terhadap tindakan pengusaha yang bertentangan dengan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja.